

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ATAS PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI KECAMATAN PACIRAN

Ahmad Bahruddin Hariyanto¹, Khoiron², Hirshi Anadza³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: ahmadbahruddinh@gmail.com*

ABSTRAK

Salah satu indikator yang sangat penting dalam pembangunan nasional yakni kesehatan, dimana kesehatan menjadi kunci utama, jika kualitas kesehatan tinggi maka akan mempengaruhi segala bidang pembangunan, maka dari itu adanya pemerataan kesehatan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk menunjang kualitas kesehatan itu sendiri. Kabupaten Lamongan melalui Dinas Kesehatan memulai Pemerataan kesehatan dari pembagian wilayah kerja dimana pembagian wilayah kerja ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan juga pemerintah mudah dalam memberikan pelayanan serta dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dalam pedalaman. Dalam pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, seperti fakta di lapangan bahwasanya ada masyarakat yang kurang menerima adanya kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas. Adapun beberapa pokok permasalahan yang dapat di evaluasi dalam penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja. Seperti apakah kebijakan ini sudah efektif menimbang ada banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidakpuasan kebijakan ini, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang menerima informasi yang akurat, yang kedua kurangnya fasilitas yang memadai, hal ini juga mempunyai peran penting dalam mendukung kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yakni kualitas pelayanan yang dirasa masih belum memuaskan masyarakat. Dari berbagai proses evaluasi peneliti menemukan beberapa rekomendasi dan saran dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dengan adanya kebijakan ini masyarakat mengetahui agar dapat memaksimalkan. Selanjutnya perbaikan serta penambahan fasilitas juga menjadi salah satu saran agar dapat menunjang kebijakan pembagian wilayah kerja. Dan yang terakhir yakni memperbaiki pelayanan, hal ini yang terpenting karena kepuasan masyarakat didapatkan atas pelayanan yang di berikan

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Puskesmas, Pembagian Wilayah Kerja

Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu kunci pembangunan nasional yang mana tujuannya Dalam rangka mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, penting untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu dalam menjalani gaya hidup yang sehat. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan krusial dalam pembangunan kesehatan, bahkan berkontribusi hingga 80% dari seluruh faktor yang terkait dengan pembangunan kesehatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2012. Dengan upaya kolaboratif dan komitmen untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat, diharapkan masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 36

tahun 2009 (Undang-Undang Kesehatan) yang menyatakan bahwa: "Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan)

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia yakni di setiap kecamatan didirikan instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara kesehatan masyarakat, yaitu Puskesmas atau bisa disebut juga dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dimana peran Puskesmas ini menjadi pusat pertolongan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurut BPS. Kabupaten Lamongan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 1.189.380 Jiwa dengan jumlah Laki-laki sebanyak 578.113 jiwa dan Perempuan 611.267 jiwa. Puskesmas yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Puskesmas Paciran 2117,7 jiwa. (Profil Kesehatan, 2020:05). Maka dari itu di wilayah kecamatan paciran dengan Surat Keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor Surat Keputusan 188/946/Kep/413.111/2019 menginstruksikan bahwa memberikan izin operasional Puskesmas Tlogosadang sebagai Puskesmas Induk Ke 2 dan membawahi 2 Puskesmas pembantu.

Tujuan didirikan lagi sebuah Puskesmas Tlogosadang dengan harapan bisa mengurangi bobot kerja dari Puskesmas Paciran dengan sistem pembagian wilayah kerja maka demikian masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Dapat diketahui bahwa pembagian wilayah kerja puskesmas sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Maka dari itu dengan luas wilayah Kecamatan Paciran 70,21 Km dengan 16 Desa dan 1 kelurahan (BPS. Kab. Lamongan, 2021:12). Dengan letak Puskesmas Paciran terletak di wilayah bagian barat Kecamatan Paciran dan Jumlah masyarakat Kecamatan Paciran sebanyak 2117,7 jiwa (Profil Kesehatan, 2020:05). Maka perlu adanya kebijakan tentang pembagian wilayah kerja puskesmas dengan harapan bisa mengurangi bobot kerja dari Puskesmas Paciran dengan sistem pembagian wilayah kerja maka demikian masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Pembagian wilayah kerja Puskesmas juga terjadi di beberapa Kecamatan diantaranya yaitu di Kecamatan Paciran, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Sukodadi dengan 2 Puskesmas Induk, dan Kecamatan Babat sebanyak 3 Puskesmas Induk (Profil Kesehatan, 2020:08). Ini menandakan bahwa beberapa wilayah Kecamatan yang tingkat aktivitas masyarakatnya tinggi. sehingga perlu dibagi wilayah kerja puskesmas guna untuk mengurangi bobot kerja dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan yang terbaik.

Semenjak kebijakan ini diberlakukan mulai dari tahun 2019 sampai saat ini kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas ini justru menuai hal negatif dari masyarakat, dikarenakan Puskesmas Tlogosadang belum siap menjadi puskesmas induk ke 2 di Kecamatan Paciran dikarenakan kualitas pelayanan, kualitas kesehatan dan fasilitas yang dirasa kurang memadai. Kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran ini menjadi serangan balik bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dimana tidak di iringi dengan pemerataan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas puskesmas yang baik. Maka sewajarnya masyarakat

mengeluhkan atas kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas ini. Aksi protes ini biasanya ditujukan kepada petugas Puskesmas Tlogosadang mengenai tentang fasilitas yang dianggap kurang, keterlambatan pelayanan dan penanganan, jumlah dan macam-macam obat, alat medis dan lain sebagainya. Pembagian wilayah kerja puskesmas merupakan upaya untuk memastikan Setiap masyarakat di suatu wilayah tertentu memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, dalam penerapannya, sering kali terjadi kendala dalam pembagian wilayah kerja Puskesmas yang bisa mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Adapun beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah tumpang tindihnya wilayah kerja antar puskesmas, wilayah kerja yang terlalu luas sehingga petugas kesehatan kesusahan untuk menjangkau masyarakat, dan perbedaan kondisi masyarakat dalam satu wilayah kerja yang dapat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Evaluasi kebijakan ini memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas, serta faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pembagian wilayah kerja dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "**Evaluasi Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mengenai Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, topik yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini diformulasikan sebagai "Bagaimana kebijakan kesehatan yang mengenai pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran dinilai dalam evaluasi?"

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan terkait pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah bagi para pihak yang tertarik dan menambah pemahaman dalam bidang evaluasi kebijakan, serta menjadi kontribusi berarti dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang relevan mengenai Evaluasi Kebijakan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam implementasi pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Thoha (2012:107), Kebijakan diartikan sebagai hasil dari keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Pendapat ini menekankan bahwa kebijakan publik lebih fokus pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daripada hasil akhir yang dicapai. Kebijakan publik memiliki tugas yang sangat penting dalam struktur negara dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika suatu negara tidak memiliki komponen kebijakan publik yang baik, dapat dianggap sebagai kegagalan karena kehidupan masyarakat hanya akan diatur oleh individu atau kelompok tertentu yang hanya memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri (Nugroho, 2009:83). Parsons (2005:14) menyatakan bahwa negara tidak dapat mempertahankan kekuasaannya hanya dengan kekuatan paksa, melainkan memerlukan kebijakan sebagai sarana. Negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang sah, namun keefektifannya tergantung pada adanya kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang disengaja, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di bidang-bidang tertentu, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Agar kebijakan publik berhasil dengan efektif, diperlukan kegiatan sosialisasi, implementasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan publik difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan diwujudkan melalui peraturan, undang-undang, dan

bentuk lainnya. Karena bersifat mengikat, seluruh anggota masyarakat diharapkan mengikuti kebijakan publik tanpa terkecuali.

Pembagian Wilayah Kerja

Menurut Hasibuan (2015:125), Pembagian Wilayah Kerja dapat diartikan sebagai pengelompokan tugas, pekerjaan, atau kegiatan yang serupa dalam sebuah unit kerja atau departemen, berdasarkan hubungan yang erat antara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pembagian wilayah kerja pada puskesmas meliputi wilayah satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Dalam menentukan pembagian wilayah kerja Puskesmas, ada beberapa pertimbangan yang digunakan, yaitu faktor kepadatan penduduk, luas daerah, kondisi geografis, dan keadaan infrastruktur.

Evaluasi pembagian wilayah kerja

Menurut Casley dan Kumar, evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi, dan dampak suatu proyek dengan membandingkannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Fink dan Kocekoff mendefinisikan evaluasi sebagai serangkaian prosedur untuk menilai mutu sebuah program (Fredy S, 2003:15).

Dror (sebagaimana disebutkan oleh Abidin, 2002:221) berpendapat bahwa evaluasi adalah proses yang menyeluruh yang melibatkan elemen-elemen output, inputs, kriteria, dan standar. Di sisi lain, Hogwood (sebagaimana disebutkan oleh Abidin, 2002:221) melihat evaluasi sebagai suatu proses dan menyebutkan beberapa aspek yang dapat digolongkan sebagai elemen dari kebijakan, seperti obyektif atau tujuan, kriteria, dampak sampingan, informasi, hasil (outcomes), target multiprogram, dan distribusi dampak.

Berdasarkan pandangan Lester dan Stewart (sebagaimana dikutip oleh Agustino, 2014:185), evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk mengidentifikasi sebagian kegagalan dalam suatu kebijakan dan untuk menilai apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan menghasilkan dampak yang diharapkan. Tidak semua kebijakan yang dibuat dapat dijalankan sesuai rencana, maka dari itu evaluasi diperlukan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan, mulai dari implementasi hingga dampak atau hasil yang terjadi.

Menurut Lester dan Stewart (sebagaimana dikutip oleh Winarno, 2004:229), ada empat unsur penting dalam menyusun standar evaluasi kebijakan, yaitu Pengkhususan (*Spesifikasi*), Pengukuran (*Measurement*), Analisis, dan Rekomendasi. Pengkhususan (*Spesifikasi*) merupakan elemen yang

paling krusial dalam evaluasi kebijakan. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan atau kriteria dari program kebijakan yang akan dievaluasi, serta menetapkan kriteria untuk menilai manfaat yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Pengukuran (*Measurement*) berkaitan dengan kegiatan pengumpulan informasi yang relevan mengenai objek evaluasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat terkait aktivitas dari kebijakan yang sedang dievaluasi. Analisis melibatkan penggunaan informasi yang telah terkumpul untuk menyusun kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengerti dan mengevaluasi dampak serta efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Rekomendasi merupakan tahap di mana keputusan diambil mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu mendatang. Dalam tahap ini, evaluasi yang telah dilakukan membantu menentukan keputusan yang tepat untuk pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Kemudian, dari gambaran tersebut, dilakukan penafsiran dan pembuatan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.

Fokus Penelitian

Dengan adanya kejelasan dalam fokus penelitian, peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai data yang perlu dikumpulkan dan data yang tidak diperlukan. Fokus penelitian yang jelas akan membantu memudahkan pelaksanaan penelitian dengan menetapkan batasan-batasan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti melalui indikator-indikator sebagai berikut: Kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran:

- a) Pelaksanaan Kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran
 - b) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran
1. Evaluasi kebijakan Pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran:

Dalam Evaluasi Kebijakan Dinas kesehatan Kabupaten Lamongan Atas Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas Di Kecamatan Paciran, peneliti

menggunakan teori model evaluasi kebijakan menurut Lester dan Steward dalam bukunya Budi Winarno (2004:229) yaitu:

- a) Pengkhususan (*spesification*) pada Kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas:
 - (1) Tujuan diterapkannya kebijakan pembagian wilayah kerja,
 - (2) Efisiensi kebijakan pembagian wilayah kerja.
- b) Pengukuran (*Measurement*) atau pencarian informasi pada pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran:
 - (1) Pengukuran pada kemudahan dan efisiensi pada kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas
 - (2) Analisis kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran:
- c) Analisis dan evaluasi kemudahan dan efisiensi pada kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran
- d) Rekomendasi setelah proses analisis kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran.

Situs dan Latar Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini merujuk pada lokasi yang sesungguhnya menjadi objek dalam penelitian, yang akan memberikan informasi yang akurat sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kesehatan Lamongan, yang merupakan pihak yang mengeluarkan kebijakan, serta Puskesmas Paciran dan Tlogosadang, yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data:

- a) Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer diolah oleh peneliti sendiri dan melibatkan wawancara dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Puskesmas Paciran, Tlogosadang, dan masyarakat yang sedang berobat.
- b) Data Sekunder
Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan berasal dari sumber kedua. Data sekunder dapat berupa catatan atau informasi dari dokumen, buku-buku ilmiah, laporan, situs internet, serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan melakukan interaksi intensif dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat dua jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Metode wawancara terstruktur digunakan untuk merencanakan masalah-masalah dan pertanyaan yang akan diajukan, sementara metode wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya, sehingga wawancara berlangsung secara alami dan mengalir.
- b) Observasi: Teknik ini digunakan dalam penelitian lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian dan kehidupan yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk memahami dan mendapatkan gambaran yang akurat tentang situasi yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan secara langsung pada instansi atau lembaga yang memiliki peran dalam pelayanan kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas Paciran, Puskesmas Tlogosadang, serta masyarakat yang terlibat.
- c) Dokumentasi: Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, data, atau arsip yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari instansi pemerintah dan tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Puskesmas Paciran, dan Puskesmas Tlogosadang. Dokumentasi ini mencakup bentuk foto dan rekaman wawancara.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2014:20) menjelaskan bahwa analisis data terdiri dari tiga langkah kegiatan yang berjalan secara simultan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga langkah ini dilakukan dalam suatu siklus interaktif sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membentuk wawasan umum yang disebut "analisis".

- a) Data dikumpulkan melalui pencarian, pencatatan, dan pengumpulan informasi secara subjektif yang sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan serta Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosadang. Dokumen juga menjadi data pendukung dalam pengumpulan informasi

yang terkait dengan evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran.

- b) Reduksi Data menjadi langkah yang perlu dilakukan karena data yang diperoleh dari peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Puskesmas Paciran, dan Puskesmas Tlogosadang ternyata cukup melimpah. Oleh karena itu, penting untuk mencatat informasi dengan cermat. Semakin sering peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks, dan rumitnya data yang terkumpul. Oleh karena itu, dilakukanlah kondensasi data untuk merangkum catatan informasi di lapangan dengan memilih informasi yang esensial dan relevan dengan permasalahan penelitian..

c) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk yang terstruktur dan terorganisir, sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau naratif, yang menggabungkan informasi secara komprehensif.

d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Proses ini melibatkan mencatat pola-pola teratur, menggambarkan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Analisis ini dilakukan berulang-ulang dan secara bertahap, dengan tujuan akhirnya adalah menghasilkan penulisan akhir dari penelitian.

Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif dapat dianggap valid dalam konteks penelitian ilmiah, diperlukan uji keabsahan data. Beberapa jenis uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji kepercayaan dilaksanakan peneliti dengan memperlebar wilayah pengamatan, menambahkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis permasalahan negatif, penggunaan bahan rujukan dan verifikasi anggota maupun masyarakat.
2. Uji ketergantungan ini dilaksanakan peneliti dengan melakukan perhitungan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan konsultasi oleh pembimbing, kemudian pembimbing dengan peneliti menghitung seluruh proses penelitian termasuk menentukan permasalahan, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data dan pengujian keabsahan data serta penulisan laporan hasil penelitian. Perhitungan ini dilakukan agar

penulis dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

Kebijakan atas pembagian wilayah kerja merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam suatu wilayah. Pembagian wilayah kerja memungkinkan penyebaran sumber daya dan tanggung jawab secara terorganisir, sehingga dapat mencapai aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Pertimbangan demografis sangat penting untuk memastikan bahwa wilayah kerja memiliki jumlah penduduk yang dapat dilayani dengan baik oleh pelayanan kesehatan. Analisis jumlah penduduk, kepadatan, dan karakteristik demografis membantu menentukan ukuran wilayah kerja yang optimal. Selain itu, kebutuhan dan keberagaman sosial-budaya juga diperhitungkan agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat di setiap wilayah.

Pembagian wilayah kerja puskesmas memiliki peran signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui pembagian ini, setiap wilayah kerja puskesmas dapat beroperasi secara efisien dan efektif, memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam mengevaluasi program kebijakan ini, peneliti menggunakan teori model evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran oleh Lester dan Steward Lester dan Steward (Winarno, 2004:229). Yang menyatakan ada empat tahap evaluasi yakni pengkhususan (*Specification*), pengukuran (*Measurement*), analisis dan rekomendasi. Melalui tahap ini peneliti mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam membagi wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.

a) Pengkhususan (*Specification*)

a.1 Pemerataan Kesehatan

Saat ini, pertumbuhan sektor kesehatan di Indonesia masih dianggap belum optimal. Pelayanan kesehatan dari pemerintah belum tersebar merata, padahal kesehatan yang baik merupakan kunci penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk mencapai kesehatan yang baik, dibutuhkan berbagai upaya, salah satunya adalah penyediaan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dianggap sebagai hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk memperbaiki kualitas kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

mendukung seluruh proses pembangunan di Indonesia.

Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap hak warga Negara Indonesia. Maka dari itu Bupati Lamongan dalam rapat koordinasi dengan seluruh OPD Kabupaten Lamongan menyampaikan 11 program utama salah satunya yakni pemerataan pelayanan kesehatan. Program ini ditujukan untuk daerah yang jumlah penduduk dirasa sangat padat dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Lamongan. Maka dengan adanya program ini didirikan puskesmas induk tambahan guna untuk membantu puskesmas induk yang pertama dengan harapan adanya puskesmas induk yang kedua ini bisa mempercepat pembangunan kualitas kesehatan yang baik dan dapat memenuhi atau mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Adapun dasar hukum yang mengatur atas kebijakan pembagian wilayah kerja yang peneliti dapatkan hanyalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Nomor Surat 188/946/Kep./413.111/2019 tentang Izin Operasional Rawat Inap yang mana dalam aturan ini sudah mengatur mengenai pembagian wilayah kerja.

a.2 Kolaborasi Pelaksanaan

Tugas pemerintah adalah melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan ini disediakan melalui berbagai lembaga atau institusi pemerintah, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang bertugas menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas berperan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas bertujuan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.

Tidak hanya puskesmas yang bertanggung jawab atas kebijakan pembagian wilayah kerja tetapi juga dibantu dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, TNI dan Polri. Terjalinya kerja sama dapat menentukan keberhasilan suatu produk kebijakan dimana sinergitas dan solidaritas lintas OPD selalu terjaga. Maka dari itu terciptanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di kecamatan paciran, dengan hasil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kepuasan masyarakat serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan respon yang baik.

a.3 Tujuan Kebijakan

Evaluasi kebijakan dimulai dengan penentuan tujuan dan kriteria melalui program yang akan dievaluasi, hal ini masuk pada tahap pertama evaluasi yakni pengkhususan atau Specification. Dalam tahapan ini, dapat diketahui bahwasannya evaluasi ini termasuk pendekatan evaluasi formal. Menurut Dunn (2003), pendekatan evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil dalam kebijakan dan mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Maka dapat ditentukan kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan Pembagian wilayah kerja puskesmas oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Paciran

Kriteria evaluasi kebijakan ini dilihat dari tujuan dalam pengaplikasian kebijakan di Puskesmas yang ada di Kecamatan Paciran. Tujuan diterapkannya kebijakan pembagian wilayah kerja yakni untuk mencapai efektifitas dan efisiensi serta kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten lamongan yaitu dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Dijelaskan pula oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwasannya pembagian wilayah kerja puskesmas merupakan salah satu terobosan baru serta inovasi dalam sistem pelayanan di bagian kesehatan yang dapat meminimalisir bobot kerja para pegawai kesehatan, serta dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak adanya antrian yang berkesan masyarakat tidak dilayani dengan baik, secara tidak langsung kebijakan pembagian wilayah kerja ini juga dapat meminimalisir waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat hanya untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan.

b) Pengukuran (Measurementt)

b.1 Kemudahan Pelayanan Masyarakat.

Masuk pada tahap evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran yang kedua yakni Pengukuran Measurementt. Pada tahap ini peneliti mencari berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas dengan beberapa instansi yang terkait seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosadang terkait terpenuhinya standar pelayanan publik bahwa Kebijakan pembagian wilayah kerja memberikan dampak yang positif pada dunia pemerintahan dalam hal kesehatan. Disampaikan bahwa kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas dapat meminimalisir tumpukan antrian, beban kerja serta dapat menjangkau dan mengakomodir kebutuhan

masyarakat secara baik. Hal ini dikarenakan prosesnya yang dapat mudah dilakukan oleh masyarakat tanpa memikirkan masalah lokasi yakni jarak masyarakat ke puskesmas dimana sebelum adanya pembagian wilayah kerja puskesmas ini masyarakat bagian timur Kecamatan Paciran berobat ke Puskesmas Paciran dengan jarak kurang lebih 15 KM, dengan adanya pembagian wilayah kerja masyarakat bagian timur Kecamatan Paciran bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tlogosadang dengan tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga yang berlebihan. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat tidak perlu berobat ke Rumah Sakit swasta yang ada di Kecamatan Paciran tentunya juga akan memakan biaya yang lebih mahal serta pelayanan tidak semudah instansi pemerintah yang bergerak dalam hal kesehatan yakni puskesmas.

b.2 Kepuasan dan Kecepatan Pelayanan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Puskesmas di Kecamatan Paciran meningkat dan pelayanan dianggap lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Rata-rata, masyarakat yang datang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas di Puskesmas Paciran dan Tlogosadang. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara langsung dengan Kepala Puskesmas bahwasanya program kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas ini memudahkan masyarakat dalam bidang pelayanan masyarakat dimana sebelum adanya kebijakan ini masyarakat di fokuskan kepada satu puskesmas induk meskipun dengan dibantu puskesmas pembantu tetapi dalam hal kinerja puskesmas pembantu tidak bisa sebaik puskesmas induk.

Tidak dapat dipungkiri kebijakan pembagian wilayah kerja juga membantu mengurangi bobot kinerja Puskesmas Paciran dengan sistem pembagian wilayah kerja serta penduduk dengan Puskesmas Tlogosadang. Adapun dampak positif pembagian wilayah kerja ini masing-masing puskesmas bisa berfokus terhadap wilayahnya masing masing sehingga bisa memberikan pelayanan secara baik dan maksimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu program Bupati Lamongan juga berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

b.3 Kecepatan Merespon Masyarakat.

Pada poin Kecepatan dalam merespon kebutuhan masyarakat ialah dimana kebijakan ini dikeluarkan puskesmas bisa berfokus kepada wilayahnya tanpa adanya tumpang tindih tugas atau tugas difokuskan kepada satu puskesmas. Tidak hanya itu kebijakan ini juga memberikan keuntungan kepada masyarakat sehingga cepat mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana jumlah masyarakat di Kecamatan Paciran

terbagi sehingga bobot kerja puskesmas tidak berlebihan serta fasilitas sarana juga bisa digunakan dengan optimal dengan semestinya. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat dapat mudah dalam menjangkaunya dimana untuk masyarakat kecamatan paciran bagian timur yang ingin mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan harus menempuh jarak 11 KM demi mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Maka dengan adanya pembagian wilayah ini masyarakat di Kecamatan Paciran di wilayah timur hanya cukup datang ke Puskesmas Tlogosadang. Dimana Puskesmas Tlogosadang mulai memperbaiki kualitas pelayanannya seperti halnya kualitas dokter, perawat dan staf administrasi serta meningkatkan pembangunan fasilitas yang memadai.

c) c. Analisis.

c.1 Analisis dan evaluasi Kebijakan.

Selanjutnya pada tahap ketiga yakni analisis kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran oleh Dinas Kesehatan. Pada tahap ini masuk pada tahap analisis terhadap program kebijakan pembagian wilayah kerja yang telah dilaksanakan guna mengetahui ketercapaian program. Arikunto (2002) Dalam bukunya, penulis mendefinisikan evaluasi program sebagai salah satu bentuk penelitian, yang disebut sebagai penelitian evaluatif. Dari definisi evaluasi program tersebut, analisis program kebijakan pembagian wilayah kerja bertujuan untuk menilai mutu atau kondisi suatu hal sebagai hasil dari pelaksanaan program pembagian wilayah kerja pada sistem pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan informasi yang didapat, proses pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dan bahan evaluasi dari kebijakan pembagian wilayah kerja ini yakni pada kualitas pelayanan serta fasilitas Puskesmas Tlogosadang yang Sebagian masyarakat anggap kurang baik dikarenakan pada saat kebijakan ini di implementasikan atau diterapkan pihak Puskesmas Tlogosadang masih belum siap untuk menjadi puskesmas induk kedua. Akan tetapi semakin pesatnya pertumbuhan masyarakat dan pola aktivitas masyarakat paciran yang padat sehingga penduduk terpadat di Kabupaten Lamongan yakni di Kecamatan Paciran. Puskesmas Tlogosadang ditunjuk sebagai puskesmas induk kedua dengan segala kekurangan yang ada. Akan tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mengakomodir kebutuhan dan menjalankan program pemerintah Kabupaten Lamongan dengan sebaik-baiknya.

Analisis yang dilakukan selanjutnya yaitu pada standar pelayanan publik yang mudah dan cepat. Standar pelayanan publik ini terpenuhi melalui adanya

kebijakan pembagian wilayah kerja ini. Kebijakan ini tidak melanggar asas hukum apapun sehingga dapat memberikan akses yang mudah bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu tentunya menjadikan pemerintah semakin efektif dan efisien dan juga dapat mudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

d) Rekomendasi.

Setelah melalui proses analisis mengenai kebijakan pembagian wilayah kerja ini, selanjutnya masuk pada tahap terakhir evaluasi yakni rekomendasi untuk dapat dijadikan perbaikan dalam implementasi kebijakan ini kedepannya. Tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan menurut Alamsyah (2016: 108-109) pada bukunya ialah untuk mengukur kinerja, efisiensi, dampak dan juga permasalahan yang ada pada suatu kebijakan. Disebutkan pula Tujuan utama dari evaluasi adalah memberikan masukan yang berharga bagi proses kebijakan, sehingga di masa depan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Pada bagian rekomendasi, terdapat beberapa masukan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.. Pada hasil wawancara telah disinggung adanya faktor penghambat dalam penerapan evaluasi kebijakan ini. hal ini juga didukung dengan analisis pada tahap evaluasi kebijakan dengan ditemukannya beberapa alasan yang telah disebutkan diatas yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran.

d.1 Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Dari poin-poin tersebut yang mendasari kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan ini ialah karena minimnya informasi dan sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dimana yang berperan disini yakni Dinas Kesehatan, Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosadang. Dengan adanya temuan dari hasil wawancara harapannya pihak pelaksana dan pihak pemerintah bisa mengadakan sosialisasi lanjutan dan tetap bertahap serta selalu melakukan inovasi-inovasi perubahan serta pengembangan di bidang Kesehatan

d.2 Kurangnya infrastruktur dan fasilitas.

Selanjutnya yang menjadi perhatian khusus yakni masalah fasilitas infrastruktur yang dikatakan masih kurang, untuk menunjang penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran. Masyarakat kecamatan paciran yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Tlogosadang sering mengeluhkan mengenai sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Tentunya ini menjadi faktor penting ketika pemerintah Kabupaten Lamongan ingin

memecah wilayah kerja puskesmas harus juga di iringi dengan pembangunan yang baik serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di wilayah kerjanya. Proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan melalui pedoman dan tahapan-tahapan yang ditentukan. Dimulai pada tahap penentuan kriteria evaluasi, pencarian informasi yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan tahap analisis terhadap informasi yang telah didapatkan melalui Stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan kepala UPT Puskesmas Paciran dan Tlogosadang, hingga pada akhirnya proses evaluasi ini dapat memberikan perbaikan untuk kebijakan selanjutnya maupun perbaikan dalam proses pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan selama empat tahun sejak 2019 dinilai berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai tingkat keunggulan yang diinginkan. Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, seharusnya dapat mencapai tingkat keunggulan. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran mencakup: [silakan dilanjutkan dengan isi penelitian yang relevan].Evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan atas pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.

Dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di kecamatan paciran ini, dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi menurut Lester dan Stewart dalam bukunya Budi Winarno pada tahun 2014 dengan 4 elemen tahapan evaluasi yaitu :

1. Pengkhususan (*Specification*)

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti ialah pada tujuan diterapkannya program kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran dan umumnya di Kabupaten Lamongan dengan harapan meratanya pelayanan kesehatan, terpenuhinya standar pelayanan publik yang mudah dan cepat.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Ditemukan bahwasanya pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah ini merupakan

inovasi dan terobosan baru dalam bidang pelayanan publik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan program Bupati Lamongan, serta menjadikan seimbang bobot kerja yang diterima pihak puskesmas sehingga akan mempercepat dalam merespon keluhan atau kebutuhan pelanggan yakni Masyarakat

3. Analisis

Ditemukan alasan bahwasanya adanya ketidakpuasan beberapa masyarakat mengenai pembagian wilayah kerja ini yakni kurangnya informasi dan sosialisasi yang didapat oleh masyarakat yang seakan akan kebijakan ini belum siap diterapkan di Kecamatan Paciran. Selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan masyarakat yakni mengenai pelayanan dan fasilitas yang dirasa belum memadai sebagai puskesmas induk kedua, dimana pola kehidupan masyarakat wilayah timur di Kecamatan Paciran selalu mendapatkan pelayanan yang baik dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

4. Rekomendasi

pada poin ini berisikan rekomendasi perbaikan terkait dengan permasalahan yang ada. Sosialisasi lanjutan terkait kehadiran kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas sehingga masyarakat tidak bingung lagi ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta pembangunan fasilitas baru demi menunjang pelaksanaan kebijakan ini sehingga memberikan kesan kepuasan masyarakat yang lebih baik. Hal ini menjadi poin utama untuk perbaikan penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja secara lebih baik lagi.

Saran

Setelah pelaksanaan proses evaluasi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten lamongan mengenai pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran, diharapkan adanya perbaikan untuk memperbaiki beberapa permasalahan yang muncul pada saat penerapan program kebijakan ini. Diharapkan dengan adanya evaluasi serta perbaikan ini memberikan masukan yang positif kepada instansi yang terkait agar dapat maksimal memberikan pelayanan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terciptanya kualitas kesehatan yang baik.

Adapun saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja ini untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan proses sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat Kecamatan Paciran. Proses evaluasi dapat dilaksanakan dengan seluruh elemen Pemerintah atau Stakeholder di Kecamatan Paciran. diharapkan dengan adanya sosialisasi ini memberikan informasi atau treatment lebih kepada masyarakat dalam mendapatkan kesehatan yang baik
- b. Memperhatikan pembangunan fasilitas. Dimana yang masyarakat nilai pertama sebelum pelayanan yakni bukti fisik bangunan yang ada di puskesmas tersebut. Jika fasilitas yang memadai masyarakat juga merasa terpuaskan oleh fasilitas yang ada
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor terpenting dalam implementasi kebijakan ini yakni tentang pelayanan. Pelayanan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat sehingga pelayanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Pelayanan juga berhubungan langsung kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abidin, Said Zainal. (2002) *Kebijakan Publik*. Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2014) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta.
- Fredy S. Nggao. (2003) *Evaluasi Program*. Jakarta, Nyansa Mandiri.
- Nugroho, Riant. (2009) *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang (model-model Perumusan implementasi dan evaluasi)*. Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Thoha, M. (2012) *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2004) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo

Jurnal Atau Skripsi:

- BPS Kab. Lamongan. (2021) *Kecamatan Paciran Dalam Angka*. Lamongan, CV. Azka Putra Pratama Surabaya.
- Hidayat, Taufik (2020) *Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2020*. Lamongan.

Internet :

- Puskesmas Tlogosadang. 2019. "Terimakasih atas saran dan kritikan anda berikut hasil tindak lanjut keluhan anda di tahun 2019", <http://pusktlogosadang.blogspot.com/2020/09/>

terimakasih-atas-saran-dan-kritik-anda.html?m=1. Diakses pada Tanggal 25 Desember 2022

Puskesmas Tlogosari. 2022. "Peresmian Gedung Poned Puskesmas Tlogosadang", <https://lamongankab.go.id/beranda/dinkes/post/8214>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022

<https://www.indonesia-tourism.com/east-java/tourism/lamongan/map/lamongan-map.png>

Peraturan atau Perundang Undangan :

- Peraturan Menteri Kesehatan 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
- Peraturan Presiden RI. (2012). Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- SK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor SK 188/946/Kep./413.111/2019 Perizinan Puskesmas Tlogosadang Sebagai Puskesmas Induk Ke 2
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan